

KONTRIBUSI APRESIASI SISWA TENTANG PEMBELAJARAN SEJARAH, PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA, PEMAHAMAN NILAI- NILAI AGAMA TERHADAP SIKAP NASIONALISME

Mohamad Na'im
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember
e-mail: mohamadnaim66@yahoo.co.id

***Abstrak.** Upaya menumbuhkembangkan sikap nasionalisme pada siswa dalam lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur tidaklah mudah, perlu ada langkah strategis. Langkahnya yaitu mengembangkan kurikulum terpadu antara matapelajaran Sejarah, PKn, dan Pendidikan Agama. Melalui pembelajaran sejarah nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah dapat membangkitkan nasionalisme. Melalui pembelajaran PKn pemahaman terhadap ideologi Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat memperkuat kecintaan pada bangsa dan negara. Melalui pendidikan agama pemahaman nilai-nilai agama dapat menjadi dasar penegakan kebenaran, menjaga keutuhan bangsa dan negara atau sikap nasionalisme. Apresiasi siswa terhadap pembelajaran sejarah, pemahaman ideologi Pancasila dan pemahaman nilai nilai agama mampu meningkatkan sikap nasionalisme.*

***Kata kunci:** Apresiasi, Pembelajaran Sejarah, Pancasila, Nilai Religi, Sikap Nasionalisme*

***Abstract.** Efforts to develop an attitude of nationalism in students within the multicultural life of the Indonesian people is not easy. There should be a strategic move. Integration curriculum between History, Civics, and Religion are needed. The values of teaching history contained within historical events can evoke nationalism. An understanding of Pancasila through Civics curriculum as a guide to behave in society, nation, and state can strengthen the love of the nation. An understanding of religious values can be the basis of the rule of truth, preserving the integrity of the state or nation and nationalism. Students' appreciation of the history of learning, understanding of Pancasila and religious values can improve the attitude of nationalism.*

***Keywords:** Appreciation, History Learning, Pancasila, Religion Values, Nationalism attitudes*

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, membangkitkan rasa kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawannya dan berorientasi masa depan. Di samping itu diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Depdiknas, 2006:231). Pembelajaran sejarah merupakan salah satu komponen penguat dari keseluruhan komponen dalam sistem pendidikan nasional, karena itu memiliki esensi dan substansi strategis dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa masa kini dan masa mendatang.

Pembentukan jiwa patriotik, cinta tanah air dan pribadi yang bertaqwa merupakan keharusan, bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu perlu di tanamkan sejak kecil pada setiap diri generasi penerus. Penanaman nilai-nilai semacam ini, lembaga pendidikan memiliki peranan penting, karena di sinilah terjadi proses penanaman, pengembangan nilai-nilai tersebut. Penanaman dan penumbuhkembangkan nilai-nilai melalui materi pelajaran utama sejarah, pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan agama.

Ditinjau secara psikologis pada masa remaja, merupakan masa mulai memikirkan tentang hal-hal yang benar dan hal yang tidak benar, tentang norma-norma untuk membimbing tingkah lakunya, dan memilih nilai-nilai yang di anut. Nilai-nilai yang di pilih sering berubah-ubah, pada saat ini masa mencari jati diri (Soesilowindradini, 2003; Megawangi, 2004:141). Kondisi yang demikian mudah di pengaruhi, sebab nilai-nilai yang di anutnya belum begitu kuat melekat dalam sanubarinya. Menurut Furter (Sunarto dan Hartono, 1999:174), masa remaja merupakan masa mengerti nilai nilai dan terjadi proses internalisasi, nilai tersebut dijadikan sebagai nilai nilai pribadi. Oleh karena itu berbahaya jika kondisi lingkungan sosialnya kurang mendukung untuk penanaman nilai-nilai yang positif, tentunya yang di maksud nilai yang sesuai dengan sila-sila dalam pancasila dan nilai nilai agama.

Masa SMA atau masa remaja merupakan masa bergolak, juga merupakan suatu masa siap menerima nilai-nilai, maka ide, konsep, prinsip doktrin sangat tepat jika di tanamkan pada saat ini. Hal yang di maksud menyangkut nilai-nilai moral, disiplin, nilai patriotisme, nasionalisme, melalui lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat (Wirojoedo, 1986). Suryabrata (1988) mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa tumbuh suburnya rasa kebangsaan dan di sarankan seyogyanya masa peka di gunakan sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat patriotik kepada mereka. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa masa remaja merupakan masa yang paling strategis untuk menamkan nilai-nilai, sehingga terbentuk kepribadian yang mantap, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, cinta tanah air, kemantapan ideologi serta rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.

Menurut Heru (2009: 2), pemahaman Pancasila di kalangan pelajar penting, mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan salah satu falsafah yang mengikat persatuan bangsa. Pancasila juga merupakan salah satu dari empat pilar wawasan kebangsaan, selain pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keragaman budaya. Berkurangnya pemahaman terhadap ideologi pancasila berdampak pada menipisnya rasa nasionalisme, yang sudah mulai terlihat beberapa waktu terakhir. "Maraknya pertikaian antar remaja dan perkelahian antar desa merupakan salah satu tanda menipisnya rasa nasionalisme.

Mata pelajaran yang erat kaitanya dengan penanaman nilai-nilai yang di maksud, antara lain Sejarah, Pendidikan agama dan Pendidikan kewarganegaraan .

Pendidikan agama visinya adalah untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif baik personal maupun sosial. Disamping itu diharapkan menghasilkan

generasi yang aktif membangun peradaban bangsa yang bermartabat (Depdiknas, 2006:1). Pendidikan agama mampu memelihara dan memperkuat nasionalisme peserta didik, sebab dalam pembelajaran pendidikan agama (*religious education*), dibekali pemahaman nilai nilai agama yang dapat membangun dan memperkuat: 1) Nasionalisme, universalisme, respek terhadap hak azazi manusia. 2) Pluralisme dan multiculturalisme (Yusuf , 2007:11).

Apresiasi adalah kesediaan dan kegairahan untuk menerima, merespons, dan adanya kesadaran, penghayatan terhadap nilai-nilai luhur serta memberikan penghargaan terhadapnya, yang didasari pengalaman, pemahaman dan keyakinan bahwa hal tersebut adalah baik, pantas, bernilai dan menarik maka diinginkan dan diidam-idamkan yang pada akhirnya akan menimbulkan kegembiraan dan kepuasan.

Menurut Bloom (Waluyo, 2003: 172) Apresiasi berada pada tiga wilayah atau kawasan, yaitu *receiving*, *responding* dan *value*. Jika di uraikan terdapat enam indicator untuk apresiasi, yaitu : (1) menerima secara terseleksi; (2) setuju untuk memberikan respons; (3) mau memberikan respons; (4) menerima nilai-nilai; (6) pilihan atau memilih terhadap suatu nilai.

Pengertian pembelajaran sejarah dalam konteks ini adalah totalitas kegiatan belajar mengajar sejarah dimana didalamnya terjadi proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan maksud dan tujuan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pembelajaran sejarah tersebut.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat di simpulkan apresiasi terhadap pembelajaran sejarah adalah kesediaan, kegairahan untuk menerima, respons terhadap kegiatan pembelajaran sejarah serta penghayatan dan kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang didasari pengalaman, pemahaman, dan keyakinan bahwa hal-hal tersebut adalah baik, bernilai dan menarik maka diidam-idamkan, yang pada akhirnya memberikan kegembiraan dan kepuasan.

Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi sejarah yang diajarkan, antara lain mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa (Depdiknas, 2006: 523). Tujuan mata pelajaran sejarah memberikan wawasan historis dan memberi pemahaman pada siswa, bahwa segala sesuatu di lingkungan kita adalah produk sejarah, baik wilayah RI, maupun Negara nasional (Kartodirjo, 1992). Disamping hal di atas juga untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional (Depdiknas, 2006: 524). Pengetahuan sejarah memiliki peranan dalam upaya untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan dan rasa percaya diri suatu bangsa. Soekarno seperti di kutip Frederik dan Suroto (1984)

menyatakan yang intinya bahwa siapapun orangnya akan timbul semangat nasionalisme jika telah mendengar riwayat kebesaran nenek moyangnya. Kebesaran yang di capai Melayu, Sriwijaya, Mataram, kebesaran jaman Sendok, Air langga serta kebesaran Mojopahit.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Depdiknas, 2006: 231).

Disamping hal di atas Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan agar siswa memahami, menghayati dan mengamalkan sila-sila dalam pancasila. Nilai-nilai norma pancasila, nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa, nilai moral agama di terapkan dalam perilaku sehari-hari. Di samping itu mata pelajaran ini di maksudkan pula untuk membina pengetahuan dan kemampuan berkenaan berhubungan antar warga Negara dan sebagai pendidikan pendahuluan bela Negara, serta di tinjau untuk memahami konsep, pengembangan sikap dan perilaku yang di dasarkan pada nilai-nilai dasar dari norma dasar pancasila (Depdiknas, 2004).

Pendidikan agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Agama merupakan tata nilai, pedoman, pembimbing dan pendorong manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sempurna. Bagi bangsa Indonesia agama merupakan tenaga penggerak yang sangat tinggi nilainya. Agama menjadi dasar penentu perkembangan dan pembinaan rasa dan tindak kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pemahaman dan pengalamannya dengan benar diperlukan untuk menciptakan persatuan dan budaya bangsa (Feisal, 2005:27). Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan,

serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial (Depdiknas, 2006:14). Pendidikan Agama adalah pembinaan rasa dan tindak kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pemahaman yang tepat dan benar tentang nilai nilai agama diperlukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, (Feisal,1995: 27). Sebaliknya jika pemahaman nilai nilai agama yang salah akan menjadi generasi yang merusak, menjadi kelompok yang radikal bahkan lebih jauh dapat menjadi seorang teroris.

Pada masa pembangunan sekarang ini manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial percaya diri, memiliki rasa persatuan dan kesatuan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara itu sangat penting. Tantangan-tantangan yang di hadapi bangsa Indonesia makin kompleks sebab kemajuan jaman, arus globalisasi, pengaruh dari luar negri yang makin kuat juga karena kecanggihan teknologi, khususnya kecanggihan teknologi informasi. Ada pengaruh positif dan negatif. Sisi negatifnya antara lain, berkembang individualisme, konsumerisme, melunturnya nilai nilai agama dll, harus segera diatasi. Pada saat ini dapat di katakan terjadi gejala perubahan secara total, global dan structural, menyangkut kehidupan psiko-ekonomis dari segala lapisan ekonomi masyarakat. Perubahan juga pada dominasi politiko-ekonomis (kekuasaan dan kepemilikan ekonomis), dominasi sosio-teknikal (pengembangan dan tata nilai) (Suryo, 1991: Zamroni, 2007).

Perubahan yang multi dimensional di satu pihak menggembirakan, di pihak lain memprihatinkan jika di kaitkan dengan pergeseran nilai-nilai. Ada kecenderungan nilai-nilai barat mendesak nilai-nilai ketimuran. Makin meluasnya perkembangan individualisme, sedangkan gotong royong makin memudar. Dalam proses modernisasi masyarakat di bawa pembangunan ekonomi yang sangat pesat, menciptakan suasana yang *ambivalen*. Di satu pihak masyarakat masih diikat oleh nilai-nilai dan norma lama, sedangkan di pihak lain gerak modernisasi memaksa untuk menerima dan mengikuti nilai dan norma baru. Pada proses yang cepat ini lebih banyak membuat orang kehilangan pedoman dan kepribadian (Soemitro, 2001).

Di tengah arus globalisasi yang terus meningkat, justru nasionalisme perlu revitalisasi-kembali digelorkan setiap anak bangsa, jika Indonesia ingin tetap bertahan. Hanya dengan menggelorkan nasionalisme, semangat keindonesiaan, mengalami Kebangkitan Nasional kedua (Azra, 2009:7)

Fakta menunjukkan dekade terakhir ini nasionalisme generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya menurun, terbukti terjadinya konflik sosial

terjadi diberbagai tempat dengan berbagai motif dan modus operandinya serta ditambah dengan pengaruh globalisasi dengan segala implikasinya. Sebagai sebuah negara bangsa yang terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi seperti ini perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan atau pendekatan terpadu. Salah satu pendekatan dalam rangka penguatan kembali rasa kebangsaan adalah dengan mengoptimal fungsi pendidikan agama (Yusuf, 2007: 5). Posisi pendidikan agama sangat strategis karena keyakinan nilai nilai agama menjadi landasan individu dalam bersikap dan berperilaku dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap keridloan Allah, bahkan nyawapun dipertaruhkan demi keyakinannya tersebut.

Kondisi di atas sudah selayaknya menjadi bahan pemikiran, agar tidak menjadi kehilangan arah, dan pegangan dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Pemantapan ideologi sangat di perlukan sebab pada dasarnya ideologi memberikan pedoman perilaku pandangan hidup, arah dan tujuan hidup ini. Ideology akan mantap jika dibarengi dengan mantapnya pemahaman ideologi tersebut. Di Negara Indonesia ideologinya Pancasila maka sudah merupakan keharusan untuk mendalami dan mendalami ideologi Pancasila tersebut.

Di sekolah lanjutan tingkat atas upaya kearah pemantapan ideologi Pancasila telah di lakukan, baik melalui kegiatan intrakurikuler yaitu melalui pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, sejarah nasional dan pelajaran lain.

Rupanya yang menjadi permasalahan dalam pemsarakatan atau sosialisasi nilai-nilai pancasila dan upaya meningkatkan pemahaman nilai tersebut melalui kegiatan intrakurikuler, banyak yang menilai hasilnya kurang begitu memuaskan. Sebagaimana di nyatakan oleh Riberu (2004), banyak kalangan atau khalayak yang tidak begitu puas dengan pelaksanaan PKn yang cenderung kurang menarik minat siswa. Diungkapkan juga oleh Daniel seperti di kutip oleh Poespowardojo dan parere (2004) bahwa hasilnya belum menggembirakan dan hasilnya masih terbatas, Menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, upaya-upaya telah dilakukan tetapi hasilnya belum memuaskan seperti yang diharapkan.

Menurut Abu Hamid (2010), dalam pidato Peringatan hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2010 di Universitas Hasanuddin Makassar, menjelaskan, untuk merekatkan persatuan bangsa harus melalui pembumian nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila perlu dibumikan kembali melalui sosialisasi, baik di bangku sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Menurut Guru Besar UNHAS tersebut, pada era reformasi ini, pengenalan dan pengajaran nilai-nilai luhur Pancasila melalui sektor pendidikan tidak sekental pada periode sebelumnya. Padahal, hal itu penting sebagai upaya untuk merekatkan persatuan bangsa. Terjadinya konflik horizontal seperti di Tarakan, Kalimantan Timur, ataupun daerah lainnya di Indonesia, merupakan cerminan dari lunturnya "roh" Pancasila di kalangan masyarakat. "Sifat individualisme dan kelompok lebih dominan. Sudah saatnya pemerintah selaku pengambil kebijakan dan pengayom masyarakat memikirkan kembali untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal senada juga dikemukakan salah seorang tokoh masyarakat Adat Bugis Sulsel, Abd Rahim AS., mengatakan, sisi positif dari pemerintahan prareformasi

hendaknya masih bisa diserap pada era ini. Salah satu di antaranya dengan gencarnya mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Kompas, Jumat 1 Oktober 2010). Searah dengan pandangan di atas, Djaharuddin (2010), menjelaskan bahwa Pancasila yang sekarang cenderung dipinggirkan itu membuat perilaku masyarakat akhir-akhir ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, permusyawaratan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila harus dilestarikan lewat pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Menurut Anggraini (2010: 98) Lunturnya nilai nilai Pancasila berarti memudarnya karakter bangsa dan cenderung menunjukkan hilangnya jati diri kita sebagai bangsa. Dapat dianalogkan, kondisi bangsa dan negara ini seakan berjalan menuju lubang kubur yang telah digali sendiri ditengah arus globalisasi.

Gambaran kondisi di atas menunjukkan betapa pentingnya peningkatan penanaman nilai nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk menumbuhkembangkan nasionalisme para generasi muda serta membangun jatidiri bangsa. Salah satu sarana yang sangat tepat berkaitan dengan penanaman dan pengembangan nilai-nilai adalah lembaga pendidikan. Di dalamnya terjadi proses pengenalan, penanaman dan pengembangan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, melalui pelbagai materi mata pelajaran di antaranya pelajaran sejarah, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta pendidikan agama.

PEMBAHASAN

a. Sikap Nasionalisme

Sikap adalah kecenderungan untuk beraksi secara positif (menerima) atau secara negative (menolak) terhadap suatu objek berdasarkan penilaiannya berguna atau tidak baginya (Winkel, 1999). Sikap adalah kesiapan atau kesediaan yang ada pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu (Wirawan, 1982). Sejalan dengan pendapat di atas Sutarno (1989) menyatakan, sikap merupakan pandangan atau perasaan yang di sertai kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek tertentu. Sikap merupakan kecenderungan merespon yang diperoleh dari pengalaman dan cenderung konsisten. Tingkatan kecenderungan respon tersebut dapat bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek, seperti simbol, kata kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya (Azwar, 2003: 4).

Jika ditinjau secara etimologi Nasionalisme dari *national, nation (Bhs Inggris), natie/natio (Bhs Latin)* dan isme. *Nation* atau *natie* secara sederhana diartikan bangsa. *Nascie* berasal dari bahasa latin yang makna harfiahnya “lahir di” lebih lanjut dapat diartikan bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. (Riff, 1995: 194; Moesa, 2007:28).

Nasionalisme mengandung pengertian:1) Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. 2) kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu atau semangat kebangsaan (KBBI, 2005). Kohn (1965:9) menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi individu harus diserahkan kepada negara

kebangsaan (“ ..*Nationalism is a state of mind, in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*”)... Sementara Bauwer menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu keinsyafan rakyat bahwa dirinya adalah satu golongan bangsa (Dalam Abdulgani, 1964). Dalam tulisan lainnya Abdulghani (1993:1) menegaskan, Nasionalisme adalah jiwa cinta dan kesetiaan sesama bangsa, jiwa dan cinta terhadap tanah air, sebagai sumber energi untuk menjayakan bangsa, mengolah tanah air demi kemajuan dan kemakmuran bersama. Sejalan dengan pendapat di atas, Sargen (1998) menegaskan bahwa nasionalisme merupakan suatu cara yang di dalamnya individu-individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompoknya sebagai suatu bangsa.

Membahas tentang nasionalisme pada hakekatnya membahas tentang keberadaan bangsa tersebut, Renan (Hardjosatoto: 43), menjelaskan bangsa adalah suatu jiwa yang merupakan suatu asas kerokhanian didorong di antaranya karena kejayaan masa lampu, atau penderitaan yang mendorong ke arah adanya usaha bersama. Pada dasarnya yang menjadi syarat mutlak terbentuknya suatu bangsa adalah adanya keinginan atau hasrat untuk hidup bersama atau bersatu serta kesediaan berkorban untuk bangsanya, karena bangsa dilandasi suatu kesadaran moral (*conscience morale*). Jiwa, rasa, kehendak merupakan faktor subjektif. Faktor kesamaan agama, bahasa, wilayah hanyalah faktor pendorong saja bukan merupakan faktor penentu dari suatu bangsa. Pandangan Renan didukung oleh Stoddard (1966) dalam tulisannya yang judul aslinya: “*The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy*” diterjemahkan dengan judul “Pasang Naik Kulit Berwarna” yang berpendapat bahwa nasionalisme adalah ‘keadaan rohani’, yakni suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah orang yang mempunyai suatu rasa kebangsaan (*nationality*), suatu ‘perasaan tergolong bersama-sama menjadi ‘bangsa’, (*Nationalism is a belief, held by a fairly large number of individuals that they constitute a ‘Nationality’; it is a sense of bilonging together as a ‘Nation’*).

Nasionalisme berarti menyatakan atau menunjukkan kuatnya keinginan menyatu membentuk suatu ikatan karena ketertarikan, simpati dan persamaan kepentingan yang dilatarbelakangi kesamaan bahasa, budaya, keturunan bersama, kesamaan wilayah, mungkin juga kesamaan agama (Riff, 1995: 194). Dorongan yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta adanya kesamaan dalam berbagai aspek. Selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara, Anshari (1988:191) menjelaskan nasionalisme adalah faham kecintaan pada tanah air, pada negara, dan bangsa sendiri. Keberadaan negara atau negeri merupakan anugrah dan nikmat dari Allah yang harus disukuri setiap warga negara dengan cara menjaga, memelihara, membela dari penjajahan bangsanya sendiri, bangsa lain atau umat lain.

Anderson (1999) terkenal karena bukunya *Imagined Communities*, yang diterjemahkan dengan judul: “Komunitas Komunitas Imajiner: Nasionalisme”, menjelaskan sebuah bangsa adalah sebagai “sebuah komunitas politik yang terbayangkan “yakni dibayangkan sebagai baik secara inheren terbatas dan berdaulat”. Adapun kata komunitas bermakna “kelompok organisma (orang, dsb) yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu”, padanan katanya adalah “masyarakat”, sementara *community* diserap langsung menjadi komunitas. Konsep

imagined atau terbayangkan karena anggota atau warga dari nation tersebut mayoritas tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain akan tetapi di dalam alam pikirannya terbayangkan bahwa mereka adalah sama satu kesatuan dengannya.

Ada lima prinsip dalam nasionalisme, di mana yang satu dengan yang lainnya saling terkait untuk membentuk wawasan nasional. Kelima prinsip tersebut adalah (1) kesatuan (*unity*), yang dinyatakan sebagai *conditio sine qua non*, syarat yang tidak bisa ditolak; (2) kemerdekaan (*liberty*), termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat; (3) persamaan (*equality*) bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, dan (5) kepribadian (*personality*) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa, serta performance dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain (Kartodirdjo, 1992a; 1993b: 3).

Nasionalisme terdiri atas dua aspek, yaitu *resorgimento* dan *integral nationalism*. *Resorgimento nationalism* mengacu pada upaya pembebasan dan tekanan-tekanan sosial dan politik yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat atau etnis dalam upayanya membentuk dan membangun rasa kebangsaan. Sedangkan *integral nationalism* mengacu pada pembentukan dan pembangunan paham kebangsaan yang terus berkelanjutan dalam suatu negara-bangsa (Zahariadis, 1994:647).

Dari berbagai pendapat dan paparan di atas dapat dirumuskan nasionalisme adalah faham (ajaran dan keyakinan) tentang kecintaan pada bangsa dan negara yang dilandasi kesadaran adanya kesamaan cita-cita dan tujuan, keberadaan dirinya menjadi bagian dari bangsa dan negara, serta kesediaan berkorban untuknya, melestarikan identitas nasional serta adanya rasa tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sikap nasionalisme mengandung pengertian kecenderungan seseorang untuk menolak atau menerima faham (ajaran dan keyakinan) tentang kecintaan pada bangsa dan negara yang dilandasi kesadaran adanya kesamaan cita-cita dan tujuan, keberadaan dirinya menjadi bagian dari bangsa dan negara, serta kesediaan berkorban untuknya, melestarikan identitas nasional serta adanya rasa tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b. Kontribusi apresiasi siswa tentang pembelajaran sejarah terhadap sikap Nasionalisme .

Sejarah berkaitan erat dengan proses pendidikan terutama dalam perspektif pembangunan serta pembinaan bangsa (*national and character building*). Sebagai dasar pengkaitan sejarah dengan proses pendidikan, karena sejarah sebagai proses edukasi mentransfer warisan budaya (*cultural heritage*) bangsa yang di perlukan dalam proses sosialisasi dan enkulturasi generasi muda untuk selanjutnya mampu mengambil tanggung jawab dan alih generasi. Sejarah juga di anggap sebagai sumber standar moral (*moral precepts*) yang mengikat kelakuan kelompok sehingga integritas kelompok terjamin kelangsungannya. Akhirnya sejarah sebagai proses edukasi sangat penting dalam mendorong tumbuhnya pengertian atau pemahaman akan masa kini dan masa

yang akan datang untuk mampu menghadapi dan memberikan respons terhadap tantangan-tantangan yang di hadapi suatu bangsa tersebut (Partington seperti di kutip Widja, 2006).

Pengajaran sejarah juga memiliki peranan penting dalam menanamkan wawasan kebangsaan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Kartodirdjo (1982) pelajaran sejarah memiliki fungsi didaktis terutama untuk menopang pertumbuhan wawasan kebangsaan yang sangat fundamental bagi pembangunan nasional. Proses belajar sebagai proses pemahaman dan kesadaran mampu menjadi sumber inspirasi dan pangkal tumbuhnya rasa kebangsaan (*sense of pride*) dan rasa kewajiban (*sense of obligation*).

Memang sejarah memiliki tugas untuk menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air, membangkitkan kesadaran empati (*emphatic awarenass*) di kalangan peserta didik, sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain, berjiwa demokratik serta memperkenalkan pengalaman kolektif dan masa lampau bangsanya. Dengan demikian pengajaran sejarah akan membangkitkan kesadaran hidup bersama dan keterikatan (*sense of solidarity*), rasa bangga pada tanah air dan bangsanya sendiri, apabila pendidikan dilakukan berulang kali secara baik-baik dan benar (Wiraatmadja, 1993). Jelaslah bahwa pengajaran sejarah memiliki posisi yang cukup strategis asal dapat di laksanakan dengan baik dan benar. Baik dalam menyampaikan materi dan materinya tepat dalam menggunakan metode, dan siswa akan merespons dengan baik pula.

Apresiasi siswa terhadap pembelajaran sejarah, adalah tingkat penghargaan, respons terhadap pembelajaran sejarah serta penghayatan dan kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran sejarah. Oleh karena itu siswa yang memiliki apresiasi tingkat berarti siswa tersebut tinggi pula penghayatan dan kesadarannya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain nilai: keteladanan, rasa tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara dan tanah airnya, sadar keberadaan diri berbangsa bertanah air Indonesia. Penghayatan dan kesadaran ini akan di wujudkan dalam sikap nasionalisme. Makin tinggi kesadaran dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran sejarah, makin tinggi pula sikap nasionalisme. Hal ini diasumsikan karena adanya kontribusi yang signifikan apresiasi siswa terhadap pembelajaran sejarah terhadap sikap nasionalisme.

c. Kontribusi pemahaman ideologi pancasila terhadap sikap Nasionalisme

Setiap warga Negara dalam hidup bermasyarakat harus menempatkan ideologinya, dalam arti sebagai pandangan hidup (falsafah), pedoman tingkah laku, cita-cita dan tujuan dalam hidup ini. Sebagai ideologi dalam hidup bermasyarakat meliputi beberapa aspek atau segi, yaitu: (1) aspek sosial-ekonomi; (2) sosial-budaya; (3) sosial-politik dan; (4) sosial-keagamaan. Hidup bermasyarakat adalah hidup bersama, segi ekonomi menampakkan kegiatan berproduksi, bagian dan penggunaan barang dan jasa. Segi kehidupan menampakkan kehidupan penggunaan (aktivitas berpolitik). Segi agama menampakkan hubungan antar umat beragama (Suwarno, 1993).

Hidup bermasyarakat dalam berbagai aspek (secara umum) harus dilandasi nilai-nilai dan norma sila-sila dalam pancasila utamanya sila kedua, keempat dan kelima. Pada sila kedua mengandung nilai: (1) mengakui persamaan derajat; persamaan hak dan

kewajiban antar sesama manusia ; (2) saling mencintai sesama manusia; (3) mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) berani membela kebenaran dan keadilan.

Sila keempat memuat nilai-nilai: (1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; (2) tidak memaksakan kehendak orang lain; (3) mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4) musyawarah untuk mufakat dengan didasari semangat kekeluargaan; (5) dengan etiket baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah; (6) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (7) keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Depdiknas, 2006b:35; Tap. MPR No. XVIII Tahun 1998).

Ideologi berfungsi di antaranya sebagai pedoman perilaku atau bertindak, menciptakan rasa persatuan, kesatuan, kecintaan dan kesetiaan individu kepada kelompoknya, bangsa dan negaranya, serta mampu mengarahkan dan menggerakkan untuk berbuat dan berkorban mempertahankan tanah air, bangsa dan negaranya. Kecintaan dan kesetiaan dalam kelompoknya, bangsa dan tanah airnya di wadah dalam suatu Negara, akan diwujudkan dalam sikap nasionalisme.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap ideology Pancasila akan menumbuhkan sikap terhadap ideologi tersebut. Bagi pengikutnya pemahaman terhadap ideologi akan menumbuhkan sikap seperti yang di harapkan oleh ideologi tersebut, yaitu antara lain, kecintaan dan kesetiaan pada kelompok, bangsanya dan tanah airnya yang diwadhahi dalam suatu negara, kecintaan dan kesetiaan itu diwujudkan dalam nasionalisme, maka pengetahuan dan pemahaman ideologi pancasila serta penghayatan terhadap nilai nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila akan menumbuhkan sikap nasionalisme. Makin tinggi pemahaman terhadap ideologi Pancasila makin tinggi pula sikap nasionalisme. Hal ini karena diasumsikan karena adanya kontribusi yang signifikan pemahaman ideologi pancasila terhadap sikap nasionalisme.

d. Kontribusi pemahaman nilai nilai agama Islam tentang kehidupan, berbangsa dan bernegara terhadap sikap nasionalisme.

Menurut Rokeach (1973:5) nilai adalah suatu keyakinan abadi (*an enduring belief*) yang menjadi rujukan bagi cara bertingkah laku atau tujuan akhir eksistensi (*mode of conduct or end-state of existence*) yang merupakan preferensi tentang konsepsi yang lebih baik (*concept on of the preferable*) atau konsepsi tentang segala sesuatu yang secara personal dan sosial dipandang lebih baik (*that is personally or socially preferable*). Darmodihardjo (1986:36) menjelaskan nilai adalah sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani dan rohani. Selaras dengan pendapat tersebut Lemin et.al. (1994:1) mendefinisikan nilai sebagai seluruh keyakinan yang diperpegang dalam kehidupan (*the beliefs we hold*). Keyakinan tersebut merupakan sekumpulan gagasan tentang segala sesuatu yang dipikirkan seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang penting dalam kehidupan.

Djahiri (Maftuh,2007: 4) menjelaskan nilai merupakan sesuatu yang berharga baik menurut standar logika (benar-salah), estetika (bagus-buruk), etika (adil, layak, tidak layak), agama (dosa, halal- haram), hukum(sah-tidak sah) serta menjadi acuan sistem keyakinan diri maupun kehidupannya. Dalam buku lain beliau menjelaskan nilai dapat mengandung dua arti : 1) merupakan harga yang diberikan seseorang terhadap sesuatu yang didasarkan pada tatanan nilai (*Value system*) dan tatanan keyakinan (*belief system*) yang ada dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersangkutan. 2) nilai merupakan isi , pesan, semangat atau jiwa kebermaknaan fingsi atau peran yang tersirat atau yang dibawakan sesuatu tersebut. Jika Alquran dijadikan contoh maka Alquran memiliki nilai sebagai kitab suci yang memuat pesan, perintah, larangan dari Allah yang harus dilakukan yang meyakinkannya (umat Islam) dan memiliki nilai suci atau sakral.

Sumber nilai yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia dapat digolongkan menjadi dua macam: 1)Nilai Ilahi yaitu nilai yang diwahyukan dari tuhan melalui para rasul-Nya, yang diabadikan dalam wahyu Ilahi, atau dari Rosulnya,. Religi merupakan sumber yang utama dan pertama bagi penganutnya, dari religi nilai nilai tersebut untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari hari. Nilai nilai tersebut memiliki kebenaran yang mutlak. Contoh nilai nilai yang diambil dari ajaran Alquran. Pada nilai Ilahi ini tugas manusia adalah menginterpretasikan nilai tersebut sehingga diterapkan dengan tepat; 2)Nilai Insani yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Kebenaran dan keberlakukannya bersifat relatif dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada nilai insani fungsi tafsir adalah untuk mengembangkan konsep nilai tersebut, atau lebih memperkaya isi, atau juga untuk memodifikasi bahkan mengganti dengan konsep baru. Nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi yang turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Contoh, nilai nilai dari ideologi Pancasila maka nilai tersebut berlaku di Indonesia dan diberlakukan sejak ditetapkan sampai sekarang (sepanjang keberadaan Indonesia masih eksis) (Muhaimin, 1993: 111; Sulaiman, 1988:161).

Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi, yang mampu menjadi pelopor perdamaian dan menjadi pengayom bagi masyarakat lainnya. Nilai nilai perdamaian dijunjung tinggi dalam agama Islam. Didalam Kitab Suci Alquran terdapat hukum-hukum Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia dan cinta akan tanah airnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat hidup bahagia, rukun, tentram, damai, makmur, sejahtera dan lain-lain. Tujuan Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah di bumi, sebagaimana firman Allah: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat:” Sesungguhnya aku hendaknya menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat keharusan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau?” Tuhan berfirman “ Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(Q.S Albaqarah, Ayat 30). Islam hadir di dunia ini sebagai “*ramat li al-amin*” menjadi rahmat bagi semua insan di dunia ini.

Perintah Allah SWT. Untuk saling kenal mengenal "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya) supaya kamu saling kenal mengenal (saling bersahabat, saling hormat menghormati, kasih mengasihi, sayang menyayangi, tolong menolong dll.). Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui". (QS. 49/Al Hujurat: ayat 13).

Nabi Muhammad saw., menjelaskan dalam Haditsnya: sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*: "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam (sepenuh telapak tangan) tanah yang diambil dari seluruh bagiannya. Maka datanglah anak Adam (memenuhi penjuru bumi dengan beragam warna kulit dan tabiat). Di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan di antara yang demikian. Di antara mereka ada yang bertabiat lembut, dan adapula yang keras, ada yang berperangai buruk (kafir) dan ada yang baik (Mukmin)." (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi, berkata Tirmidzi).

Tentang nilai kesamaan kedudukan serta hak dan kewajiban. Kedudukan manusia walaupun berbeda suku, warna kulit dll., memiliki kedudukannya sama. Berkaitan dengan kesamaan kedudukan setiap individu tanpa melihat aspek keturunan, warna kulit dll, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi: Hai manusia, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, bapak kalian itu satu, Ingatlah orang Arab tidaklah lebih utama dari orang 'Ajam dan demikian sebaliknya orang Ajam tidak lebih utama dari orang Arab, orang kulit berwarna tidak lebih utama dari orang kulit hitam, dan sebaliknya, orang kulit hitam tidak lebih utama dari orang kulit berwarna, kecuali karena taqwanya. (H.R. Imam Ahmad).

Hadits di atas merupakan statemen yang sangat jelas dan Nabi Saw perihal persamaan sesama manusia, dan penegasan bahwa satu-satunya faktor yang dapat membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya hanyalah kualitas ketaqwaannya kepada Allah Swt.

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan potensi manusia supaya bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Berdasarkan konsep agama Islam, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa sehingga mampu menjalankan tugas kemanusiaan yaitu menjadi khalifah di bumi.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global (Depdiknas, 2006). Pendidikan Islam jika dilakukan secara maksimal mampu memberikan penguatan dan melestarikan rasa kebangsaan atau nasionalisme, hal ini karena dalam pendidikan agama terjadi proses penanaman nilai-nilai agama tentang menjaga keselarasan hidup dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara (Yusuf, 2007:11). Agama mejadi penguat nasionalisme, agama dapat menjadi faktor perekat bangsa (*integrating force*) dan sekaligus menjadi basis ikatan solidaritas sosial yang kuat (*supra identity*) antar warga. Agama Islam mengajarkan persaudaraan seagama (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah watahaniah*) serta persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariah*) (Musa, 2007:328).

Sebagaimana yang dipahami Quraish Shihab kekhalifahan mengharuskan empat sisi yang saling terkait. Yaitu, pemberi tugas, penerima tugas, tempat dan meteri penugasan (Shihab, 2003: 73). Keberhasilan menjadi khalifah bisa dicapai jika keempat unsur tadi dipenuhi. Yaitu dengan manusia atau sekelompok manusia yang menjalankan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam Al Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dimana ia berada.

Oleh karena itu, tiap wilayah dapat memiliki tujuan pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lingkungannya- berdasar identitas, pandangan hidup, dan nilai yang diakui pada masyarakat atau wilayah tersebut. Adapun dalam konteks nasional dapat dinyatakan bahwa pendidikan agama sangat berperan dalam pembentukan masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap bangsa dan tanah airnya sebagai modal awal untuk menjalankan pembangunan.

Di tengah kondisi Bangsa Indonesia yang plural, diharapkan Pendidikan Agama Islam mampu mengajarkan para generasi muslim untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Atau meminjam istilah Muhaimin *ukhuwah islamiah* dalam arti luas, yaitu persaudaraan antar sesama manusia untuk membentuk kesalehan pribadi dan sosial. Pendidikan telah diakui memiliki peran sentral dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam kaitannya dengan politik, pendidikan bertujuan membentuk manusia sebagai anggota sebuah bangsa yang baik dan bertanggungjawab.

Jadi sudah sangat jelas bagi seorang muslim, Allah menciptakan bermacam-macam bangsa, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam keluarga, bermacam-macam individu manusia adalah bertujuan agar satu sama lain saling kenal mengenal, saling belajar, saling bersahabat, saling berdagang, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, saling hormat menghormati kepada masing-masing budaya, bahasa dan keyakinan (Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu, Islam dll.) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, damai, makmur dan bijaksana, kedudukannya dimata Allah sama, tergantung derajat ketaqwaannya, bukan faktor keturunan dan lain lainnya.

Dalam kaitannya dengan kajian ini adalah nilai nilai yang terkandung dalam ajaran alquran dan sunah Rosul tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap nilai nilai yang diajarkan agama Islam tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan melandasi sikap dan perilakunya. Nilai yang dimaksud antara lain: berakhlak mulia, adil, saling menghargai sesama pemeluk agama dan yang beragama lain, berani membela kebenaran, membela kehormatan dirinya, bangsa dan negaranya (sikap nasionalisme). Nilai nilai agama akan menjadi

dasar dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warganegara. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap nilai nilai agama akan semakin tinggi pula sikap nasionalismenya, berarti pemahaman nilai nilai agama memberikan kontribusi terhadap sikap nasionalisme.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut di atas disimpulkan apresiasi siswa tentang pembelajaran sejarah, pemahaman ideologi pancasila, dan pemahaman nilai nilai agama memiliki kontribusi terhadap pembentukan sikap nasionalisme. Apresiasi siswa yang tinggi terhadap pembelajaran sejarah didukung pemahamannya yang baik tentang ideologi Pancasila dan nilai- nilai agama semakin menguatkan sikap nasionalismenya. Sebaliknya siswa yang rendah apresiasinya terhadap pembelajaran sejarah, rendah pemahamannya terhadap ideologi pancasila, serta rendahnya pemahaman nilai-nilai agama akan rendah atau lemah pula sikap nasionalismenya. Signifikansinya adalah sikap nasionalisme Indonesia pada siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran terpadu. Integrasi kurikulum pembelajaran Sejarah, PKn, dan Agama sudah seharusnya diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Az. 2009. *Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia : Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Sharif Hidayatullah Jakarta.
- Azwar, S.2003. *Sikap manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bloom, B. S., Krathwolh, D.R., Masia, B.B. 1980. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York : Longman Inc.
- Depdinas. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Dikmenum.
- Depdiknas. 2004. *Panduan Penyusunan Silabus*. Jakarta: Dikmenum.
- Feisal, J.A.2005. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta; Gema Insani Press
- Frankel, J.R.1977. *How to Teach About Values: An Analytical Approach*: Englewood Cliff, New Jersey: Practice- Hall, Inc
- Heru, M.2009. Pancasila dan Kedaulatan Bangsa. *Makalah Seminar Sehari Tanggal 19 Nopember 2009 Kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, UIN Yogyakarta*.
- Hornby, A.S. 2000. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London : Oxford University Press.

- KBBI.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Jakarta : Balai Pustaka.
- Kartodirjo, S. 1992. *Fungsi pengajaran sejarah Dalam pembangunan bangsa. Makalah*, surakarta : PPS IKIP Jakarta, KPK UNS.
- Kartodirjo, S.1992. *Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
- Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 *Tentang Pencabutan P4 dan Penetapan Pedoman Pemahaman dan Pengamalan Pancasila*.
- Lardizabel, A.S., Bustons, A.S, Bucu, L.C., Tangco, M.G. 1978. *Principles and methods of teaching*. Manila : Rizal Avenue.
- Maftuh, B.2007. *Pengantar Pendidikan Nilai*. Bandung: CV. Maulana
- Maliki, Z. 2004. *Agama Rakyat Agama Penguasa*, Yogyakarta: Galang Press.
- Mar'at. 1982. *Sikap manusia perubahan dan pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Muhaimin,2003 *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Poespowadojo, Soejanto. 1991 a). *Filsafat Pancasila*, Sebuah pendekatan social budaya. Jakarta : Gramedia.
- Rokeach, M. 1973. *Yhe Nature of Human Values*. New York: The Free Press
- Soesilowidradini. 2003. *Psikologi Perkembangan, Masa Remaja*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Umamah, N. 2007.*Profesionalitas Guru Sejarah di Kab. Jember*. Jember:UNEJ
- Widja, I. G. 2006. *Sera Serbi Pengajaran Sejarah*. Yogyakarta: Bentang
- Winkel, W. S. 1999. *Spikologi Pengajaran*. Jakarta : Gramedia.
- Witherington, H. C. 1952. *Educational spycology*. Boston, Massachussetts : Gin and Company.
- Zamroni. 007. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi Menuju Era Globalisasi*. Jakarta: PSAP